

**ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 4 DAN 5 DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum Islam (S.HI) Pada
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum



Oleh

**ASMA JUITA
NIM. 10522001083**

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Analisis Pelaksanaan Hak dan kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pasal 4 dan 5 ditinjau menurut Hukum Islam”**

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 hak konsumen adalah suatu individu berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak mengeluarkan pendapat, berhak untuk bertindak, berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak atas kenyamanan dan berhak untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Dalam Undang-Undang ini kewajiban konsumen adalah diwajibkan kepada konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi, beritikad baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati serta mengikuti penyelesaian sengketa secara patut.

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana hak dan kewajiban konsumen menurut pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen menurut pasal 4 dan 5 dalam undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, bagaimana pandangan Hukum islam tentang pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen menurut pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban konsumen menurut pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen menurut pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen menurut pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Metode yang penulis gunakan adalah study pustaka (*library research*) sebagai data primer tulisan ini adalah buku Undang-Undang Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen, edisi 2002. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah konten Analisis. Dalam menafsirkan kata hak dan kewajiban konsumen tujuan dari hak dan kewajiban konsumen sangat erat dalam hubungan manusia sesama manusia.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya mendapat perlindungan dari hukum. Dalam hukum Islam hak dan kewajiban konsumen dijalankan berdasarkan keadilan, hal ini bersifat Ilahiah maka hak itu tidak dapat diubah. Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 hak dan kewajiban konsumen dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku meski sudah diundangkan dalam kenyataannya hak dan kewajiban masih belum dijalankan sebagaimana mestinya. Jadi dengan demikian berdasarkan hukum yang berlaku hak dan kewajiban konsumen yang ada pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 harus dilandaskan dengan hukum Islam. Ini semua dilakukan agar dikemudian hari hukum yang ada dapat dijalankan semestinya dan tidak merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan. dalam Islam, Islam telah menggariskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama didalam hukum, tidak membedakan antara sikaya dan miskin. Islam tidak mengenal kasta yang memberikan hak istimewa kepada golongan atau kelompok tertentu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sitematika Penulisan.....	12

BAB II SEJARAH UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen	14
B. Isi yang Terkandung dalam UU No. 8 Tahun 1999.....	18
C. Bunyi Undang-Undang pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	25

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Hak dan Kewajiban dalam Islam	28
B. Pembagian Hak	29
C. Macam-macam Kewajiban	33

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

A. Hak Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999	34
B. Kewajiban Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999	48
C. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap hak dan kewajiban Konsumen dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 Pasal 4 dan 5.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam bahasa latin istilah konsumen berasal dari konsumen yang berarti memakai habis atau mencukupi. Sedangkan istilah konsumen sendiri diartikan sebagai golongan masyarakat yang tak mampu memproduksi sendiri bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga tergantung dari produsen. Secara harfiah, sebagai alih bahasa dari konsumen, konsumen berarti "seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu", juga "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang". Ada juga yang memberi arti lain, konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa.¹

Dalam ajaran Islam, perilaku individu dan masyarakat ditunjukkan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan, dan bagaimana cara menggunakan sumber daya yang ada. Karena hal ini Islam dapat diartikan bahwa Islam adalah agama yang mengandung aqidah dan mengandung peraturan dan undang-undang. Unsur daripada aqidah adalah meng-Esakan Allah dan menyembah kepadanya. Sedangkan dasar dari undang-undang adalah untuk kebahagiaan masyarakat dan menjamin serta menjaga hak-hak seseorang, dan menjaga agar tidak saling bertentangan dalam kemaslahatan umum. Maka, materi (persolan dunia ekonomi) bukan merupakan sasaran yang pokok, seperti halnya dalam undang-undang

¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Riau : UNRI PRESS, 2007). Cet I, h. 76

materialis, di mana seseorang menguasai terhadap masyarakat, dan bukan pula satu-satunya sebab untuk menjelaskan kejadian sebagaimana halnya dalam undang-undang sosialis, di mana golongan masyarakat atau golongan yang besar berusaha untuk menghancurkan atau menekankan golongan yang kecil. Islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya, namun merangkup pula masalah hubungan antar sesama manusia, bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Jadi, Islam adalah suatu cara hidup, yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia baik itu dalam kehidupan maupun di dalam bermasyarakat. Di dalam bermasyarakat tidak luput dari peraturan-peraturan yang harus dipatuhi setiap masyarakat yang mana peraturan itu sendiri sudah ditetapkan dalam suatu peraturan hukum.² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempertegas bahwa setiap individu haruslah mendapatkan perlindungan sepenuhnya.

Di Indonesia sebelum peraturan-peraturan hukum disahkan akan mengalami nasib yang sama, menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Namun hal itu mengidentifikasikan bahwa masyarakat mengharapkan akan kepastian hukum yang lebih memihak pada keadilan. Dalam memutuskan permasalahan bangsa, tentu para pihak terutama pemerintah harus mampu memandang bahwa keputusan hukum itu bukan berangkat dari kepentingan individu, golongan atau pihak asing, tetapi dari sisi keadilan dan kesejahteraan

² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). Cet. 3, h. 2

masyarakat. Masalah hukum di Indonesia memang sangat luas seperti yang terjadi pada UU No. 8 Tahun 1999.

Sejak UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disahkan dan diberlakukan efektif, terlihat belum banyak perubahan meski banyak kritikan sebagian kalangan yang mempertanyakan tentang validitasnya, karena mengandung banyak kekurangan dan dianggap masih merugikan sebagian pihak, hal ini perlu dipertanyakan karena di atas sudah dijelaskan bahwa Islam itu mengandung aqidah mempunyai peraturan hukum dan undang-undang untuk itu perlu untuk kita mempertanyakan hal yang demikian mengapa sampai saat ini konsumen itu sendiri masih banyak yang dirugikan. seperti halnya konsumen itu sendiri telah dianak tirikan oleh para produsen dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari para konsumen.

Contoh: "Seorang advokat menggugat Lion selaku pemilik Maskapai penerbangan Wings Air dikarenakan penerbangan molor 3,5 jam. Maskapai tersebut digugat oleh seorang advokat bernama David ML Tobing. David, lawyer yang tercatat beberapa kali menangani perkara konsumen, memutuskan untuk melayangkan gugutan setelah pesawat Wings Air (milik Lion) yang seharusnya ia tumpangi terlambat paling tidak sembilan puluh menit.

Kasus ini terjadi pada 16 Agustus lalu ia berencana terbang dari Jakarta ke Surabaya, pukul 08.35 WIB. Tiket pesawat Wings Air sudah dibeli.

Hingga batas waktu yang tertera ditiket, ternyata pesawat tak kunjung berangkat. David mencoba mencari informasi tetapi ia merasa kurang mendapat pelayanan. Pendek kata, keberangkatan pesawat telat dari jadwal.

David menuding Wings Air telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan keterlambatan keberangkatan dan tidak memadainya layanan informasi petugas maskapai itu di bandara. Selanjutnya David mengajukan gugatan terhadap kasus tersebut ke pengadilan untuk memperoleh kerugian serta meminta pengadilan untuk membatalkan klausul baku yang berisi pengalihan tanggung jawab maskapai atas keterlambatan, hal mana dilarang oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Sering kali tidak disadari bahwa dalam sistem kehidupan ini setiap manusia pada hakekatnya adalah bertindak sebagai konsumen, dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara semuanya adalah konsumen dari suatu produk politik yang disebut “hukum”.³

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian hukum. Kepastian bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.⁴

Dalam agama Islam dikatakan bahwa Tuhan tidak membiarkan potensi-potensi yang dimiliki manusia terabaikan dan tidak memanfaatkan dengan baik. Ajaran Islam tidak membolehkan manusia menggunakan potensi-potensinya tersebut dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, melainkan

³ Makarim Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Cet 2, h. 309

⁴ Elli M, Dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008). Cet. 3, h.139

manusia dituntut untuk pandai-pandai memanfaatkan potensi yang dimilikinya tersebut.

Sebagaimana Firman Allah Dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “Dan sesiapa Yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya”.....(Q.s al-Maidah : 32)”⁵

Hukum perlindungan konsumen dibuat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga konsumen tersebut terhindar dari kerugian-kerugian yang timbul akibat jual beli barang atau/dan jasa. Untuk itu perlu diketahui batasan-batasan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta pengaturan mengenai perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha sehingga kita dapat melihat sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen.

Setiap orang mempunyai tugas dan kewajiban. Namun di sisi lain mereka juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pihak lain.

Dalam Pasal 4 Hak Konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 1987). *Cet. Pertama*, h. 113

2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus

dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh para produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Di samping hak-hak konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban konsumen sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 5. Menurut pasal tersebut, konsumen berkewajiban untuk:

1. Mengikuti atau membaca petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.⁶

Dengan adanya kewajiban-kewajiban yang mengikatnya maka konsumen akan dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan atau kepastian hukum bagi dirinya.⁷

Menurut Pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih belum terlaksana sebagaimana mestinya

Menurut pasal tersebut semua itu sudah diberlakukan secara efektif terhadap diri konsumen dalam kenyataannya tidaklah demikian. Dalam kenyataannya hak dan kewajiban konsumen menurut pasal 4 dan 5 dalam

⁶*Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: CV. Tamita Utama Jakarta, 2002). Cet. 2, h. 7.

⁷ *Ibid.*, h.49

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya hal yang demikian masih terabaikan dan belum di jalankan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Hak dan Kewajiban Konsumen yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999, yang kemudian dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“ANALISIS PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 4 DAN 5 DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penulis meneliti beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Konsumen menurut pasal 4 dan 5 dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 dan 5 dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 dan 5 dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Batasan Masalah

Agar penulisan ini lebih terarah, maka penulis memberikan batasan pada penulisan, penulis memfokuskan pembahasan bagaimana pandangan Islam tentang Pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun Tujuan Penelitian adalah:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Bagaimana Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 dan 5 dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Bagaimana Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 dan 5 dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Bagaimana Pandangan Islam Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 dan 5 dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 dan 5 dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 dan 5 dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Islam Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Pasal 4 dan 5 dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara mempelajari, membaca, dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Di antara buku-buku kepustakaan yang menjadi sumber pokok (primer) dalam penulisan ini adalah buku *Undang-Undang Indonesia Tentang Perlindungan Kosumen*, Edisi 2002.

Sedangkan bacaan-bacaan lain yang ada relevansinya dengan pembahasan ini dijadikan bahan pendukung (sekunder) yaitu diantaranya:

- a. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), Cet. 2(2001) 3(2003) 4 (2008).

- b. Sutarman Yodo dan Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,
(Jakarta: PT. Grafindo Persada 2007).
- c. Seri Pertama (Pengelompokan Ayat-Ayat al- Qur'an) *Pancaran
al-Qur'an Terhadap Pola Kehidupan Bangsa Indonesia* (Jakarta:
Pustaka Alhusana,1983) Cet.2

3. Metode Pengumpulan data

Metode ini diawali dengan pengumpulan bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian, lalu dibaca secara cermat, kemudian disusun secara utuh dan dapat menjadi pokok permasalahan penelitian yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Setelah data tersebut terkumpul dan diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas, penulis menganalisa data yang ada dalam membahas dan menganalisa data tersebut penulis menggunakan suatu metode deskriptik analitik yaitu penulis menggambarkan/melikiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

5. Metode Penulisan

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penulisan yang menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif Analistik, (yaitu dengan cara mengumpulkan data, menyusun menjelaskan seteliti mungkin).

- b. Metode Deduktif, (yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban konsumen kemudian diambil satu kesimpulan secara khusus).
- c. Metode Induktif, (yaitu mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum).

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai masalah yang diteliti, serta memudahkan dalam memahami tulisan ini maka penulisannya dibagi kedalam lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa pasal sebagai penjabaran. Sehingga seluruh materi disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Mengemukakan atau menggambarkan secara umum tentang Sejarah UU No.8 Tahun 1999 serta sekilas lahirnya undang-undang No. 8 Tahun 1999, isi yang terkandung didalam Undang-Undang tersebut dan bunyi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
- BAB III Menerangkan pengertian Hak dan Kewajiban dalam Islam dan Pembagian-Pembagiannya dan Macam-Macam Kewajiban.
- BAB IV Menerangkan mengenai bagaimana Hak Konsumen dalam UU NO.8 Tahun 1999, bagaimana Kewajiban Konsumen dalam UU

No.8 Tahun 1999, dan bagaimana Analisa Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Islam.

BAB V Merupakan penutup yang terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

SEJARAH UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Lahirnya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lain. Dengan “*difersifikasi*” produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi dan telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang atau jasa yang ditawarkan secara *variatif*, baik yang berasal dari produksi domestik di mana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri.¹

Kondisi seperti ini, pada suatu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta sedemikian terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Namun kondisi dan fenomena tersebut, pada posisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tak seimbang,

¹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000). Cet. 4, h. 11

di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Banyaknya pemberitaan mengenai beberapa makanan yang mengandung zat pengawet seperti formalin, dan sebagainya telah merisaukan masyarakat baik konsumen maupun beberapa pedagang-pedagang terutama kelas kecil, khususnya ditingkat pengencer seperti pedagang bakso, mie, tahu, ikan asin dan lain-lain yang mana didalamnya terdapat zat pengawet yang dapat merenggut nyawa bagi orang yang mengkonsumsinya. Belum lagi tingkat kecelakaan pada penumpang transportasi, seperti kereta api, kapal laut pesawat terbang dan sebagainya yang kerap kali terjadi telah merugikan bukan saja materi, tetapi dapat merenggut nyawa manusia.

Perlindungan konsumen bukan hanya dilihat sebagai direktif dengan mengubah meja makan menjadi “Meja Hijau” atau tingkat penyelesaian kasus-kasus yang jumlahnya terus bertambah besar. Namun perlindungan konsumen harus dilihat pula dari upaya pencegahan terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan agar tidak terjadi kerugian.

Dengan mempelajari kasus-kasus yang pernah terjadi menimpa konsumen, tentu para pihak, terutama pelaku usaha dan pemerintah disarankan agar dapat mengambil pelajaran dalam menanggulangi permasalahan itu agar tidak terulang kembali. Untuk mencegah munculnya pelanggaran itu, perlu misalnya daya paksa yang kuat sehingga setiap pelanggarannya mengetahui

secara sadar bahwa tindakannya itu merupakan pelanggaran merugikan orang lain serta perbuatan dosa dengan dijatuhkan hukuman berupa sanksi-sanksi. Oleh karena itu dalam UU Perlindungan Konsumen selain mencantumkan hak dan kewajiban, perbuatan-perbuatan yang dilarang, juga tercantum tentang tanggung jawab pelaku usaha.

Hal tersebut bukanlah gejala regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen ini telah melahirkan salah satu cabang baru ilmu hukum, yaitu Hukum Perlindungan Konsumen atau yang kadang kala dikenal juga dengan Hukum Konsumen (*consumers Law*).

Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang hukum yang baru, namun bercorak universal. Perkembangan hukum konsumen di dunia bermula dari adanya gerakan perlindungan konsumen. Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang banyak yang memberikan sumbangan dalam masalah Perlindungan Konsumen. Secara historis perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakan-gerakan konsumen diawal abad ke-19. Di New York pada Tahun 1891 terbentuk Liga Konsumen yang pertama kali, dan pada tahun 1898 di tingkat Nasional Amerika Serikat terbentuk Liga Konsumen Nasional. Organisasi ini kemudian tumbuh dan berkembang dengan pesat sehingga pada Tahun 1903 Liga Konsumen Nasional di Amerika Serikat telah berkembang menjadi 64 cabang yang meliputi 20 negara bagian.²

² *Ibid.*, h. 13

Dalam perjalanannya, gerakan perlindungan konsumen ini bukannya tidak mendapat hambatan dan rintangan. Perjuangannya dimulai pada Tahun 1892 namun parlemen di sana gagal menghasilkan UU ini. Kemudian dicoba lagi Tahun 1902 yang mendapat dukungan bersama-sama oleh Liga Konsumen Nasional. Perkembangan selanjutnya terjadi pada Tahun 1914, dengan dibukanya kemungkinan untuk terbentuknya komisi yang bergerak dalam bidang perlindungan konsumen. Selanjutnya, sekitar Tahun 1930-an (dapat di anggap sebagai era kedua pergolakan konsumen) mulai dipikirkan urgensi dari pendidikan konsumen dari pendidik. Mulailah era penulisan buku-buku tentang konsumen dan perlindungan konsumen yang disertai dengan riset-riset yang mendukungnya.³

Era ke tiga dari pergolakan konsumen terjadi dalam Tahun 1960-an yang melahirkan era hukum perlindungan konsumen dengan lahirnya satu cabang hukum baru, yaitu hukum konsumen.

Di Indonesia masalah perlindungan baru mulai terdengar pada tahun 1970-an. Ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) bulan Mei 1973. Secara historis, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu

³ *Ibid.*, h. 20

untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.⁴

Tokoh-tokoh yang terlibat pada waktu itu mulai mengadakan temu wicara dengan beberapa kedutaan asing, dengan Departemen Perindustrian, DPR, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Puncaknya lahirlah “ Yayasan Lembaga Konsumen dengan moto yang telah menjadi landasan dan arah perjuangan YLKI, yaitu melindungi konsumen, dan membantu pemerintah.

Setelah itu, suara-suara untuk memberdayakan konsumen semakin lancar baik melalui ceramah-ceramah, seminar-seminar, maupun tulisan-tulisan dimedia masa. Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁵

B. Isi yang Terkandung dalam UU No. 8 Tahun 1999

Dengan disahkannya UUPK, masalah perlindungan konsumen telah dijadikan sebagai hal yang penting, artinya kehadiran UU tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen melainkan juga dapat menciptakan aturan main yang lebih terbuka oleh semua pihak.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan tetapi justru sebaliknya, perlindungan konsumen akan dapat mendapat mendorong iklim berusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas.

⁴ *Ibid.*, h. 25

⁵ *Ibid.*, h. 27

Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di mana barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah dan negara. Penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen akan selalu menjadi UU penting yang menarik untuk diperhatikan karena hal itu bukan lagi menjadi gejala regional saja, melainkan telah menjadi permasalahan global yang melanda seluruh konsumen di dunia.⁶

Pentingnya penegakan hukum perlindungan konsumen, aspek hukum merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisah dari negara Indonesia. Sebab hukum sebagai tolak ukur dalam pembangunan nasional yang diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat secara luas dan melakukan pembaharuan secara luas dan melakukan pembaharuan secara menyeluruh diberbagai aspek. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara hukum” kaedah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategi di dalam konstelasi ketatanegaraan. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi yang penegak hukum sebagai instrumen penggerakan.

⁶ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2005). Cet. 2, h. 346.

Mewujudkan suatu negara hukum tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai Budaya Hukum.

Penegak hukum dalam kurun waktu yang lama dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sebab hukum tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran. Dalam perkembangannya banyak para pelaku usaha telah melakukan pelanggaran serta penyalahgunaan untuk sebuah kepentingan usaha semata sebaliknya para penegak hukum tidak mampu menjalankan supremasi hukum yang menjadi tuntunan masyarakat yang mengakibatkan lemahnya penegak hukum yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap para aparatur hukum. Dalam kurun waktu tersebut hukum hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, dan kepentingan golongan, seiring dengan berkembangnya dunia usaha perdagangan dan industri serta tumbuhnya konsumerisme global dan upaya penciptaan keadilan sosial dan ekonomi, maka lahirlah konsumerisme sebagai paham yang membela hak-hak konsumen yang berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha.

Dalam al- Qur'an secara implisit menjelaskan penegakan kebenaran dan keadilan yang merupakan keadilan dari penegak hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Surat an-Nisa' yang mengatakan bahwa:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Apabila kamu menghukum diantara manusia maka hukumlah dengan adil" (Surat an-Nisaa':58).⁷

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu".
(Qs. an-Nisaa': 135).⁸

Dari ayat di atas, itu semua dapat mempegaruhi penegakan hukum. Penegak hukum adalah sebuah sistem yang meliputi berbagai komponen sebagai subsistem, termasuk penegak hukum itu sendiri. Pergeseran itu juga akan memungkinkan meninjau secara lebih luas mengenai fenomena dan persoalan hukum kita. Suatu keadaan objektif yang tidak perlu disembunyikan atau ditutupi yaitu masih banyak keluhan mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Keluhan tidak hanya dari pencari keadilan yang terlibat yang berkepentingan atas suatu persoalan hukum konkrit, melainkan masyarakat pada umumnya. Atau dari mereka yang menepatkan diri sebagai juru bicara pencari keadilan atau masyarakat. Namun sorotan-sorotan terhadap keadaan yang

⁷ Haji Muhammad Junus, *Terjemahan al- Qur'an al- Karim*, (Bandung: PT. al- Ma' arif, 1988). Cet. 1, h. 79

⁸ *Ibid.*, h. 91

objektif tersebut sering kali juga dapat memuaskan dalam pemecahan masalah, karena pemahaman-pemahaman yang diberikan terhadap penegakan hukum kurang tepat atau kurang lengkap.

Negara Indonesia sekarang ini tengah mengalami disintegrasi sosial dan ini adalah sebuah persoalan yang harus dihadapi dan harus dikembangkan kapasitas sistem sosial yang menghormati tingkatan-tingkatan pluralisme. Yang menjadi musuh masyarakat adalah seseorang yang melakukan kejahatan tanpa ada sanksi dan dibebaskan begitu saja secara mutlak. Keberadaan hukum dan kultur masyarakat berhubungan erat sekali, karena mempunyai hubungan timbal balik antara keduanya.⁹

Faktor sarana dan fasilitas penegak hukum tanpa ada sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebab sarana dan fasilitas harus mencakup sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil. Dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum akan menyerasikan peran yang seharusnya dilakukan secara aktual. Kesimpulan manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandang-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman atau dasar bagi perbuatan atau sikap yang dianggap sesuai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan semata, tetapi

⁹ [Http:// www. Republika.Co.id](http://www.Republika.Co.id), Tanggal 4 Mei 2010.

penegakan hukum merupakan salah satu kunci berhasil atau tidaknya suatu Negara melaksanakan tugas pemerintah secara umum dalam pembangunan di berbagai bidang, termasuk bidang perlindungan hak-hak konsumen.

Prinsip Umum yang terkandung dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 prinsip yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu sebagai berikut:

a. Prinsip Manfaat

Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya sebagai kepentingan konsumen secara keseluruhan.

b. Prinsip Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara optimal dan memberikan kesempatan pada konsumen untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Prinsip Keseimbangan

Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dalam arti materil maupun spritual.

d. Prinsip Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan pakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan.

e. Prinsip Kepastian Hukum

Di maksudkan agar konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimana Negara dalam hal ini turut menjamin adanya kepastian hukum tersebut.¹⁰

Dalam kerangka hukum-hukum sektoral tentunya UUPK dapat dipandang sebagai suatu bidang hukum baru ia setidaknya merupakan fenomena modern yang khas pada abad ke-20, Perlindungan Konsumen sebagai suatu sistem hukum tercermin dari rumusan yang terdapat dari UUPK, Dalam UUPK yaitu sebagai berikut:

“Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya UU baru yang pada dasarnya menurut ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian UU tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.”¹¹

Pengaturan mengenai aspek perlindungan konsumen tidak berarti berhenti pada satu undang-undang saja. Pemahaman terhadap hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi kunci pokok perlindungan konsumen dan pelaku usaha (produsen dan pemakai produk) berada pada posisi saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya begitu juga dengan sebaliknya. Dan kedua-duanya

¹⁰ Edmom Makarim, *op., cit.* h. 135

¹¹ *Ibid.*, h. 356

membutuhkan perlindungan hukum yang harus dibentuk melalui seperangkat aturan hukum di bidang yang terkait.

C. Bunyi Undang-Undang pasal 4 dan 5 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pada pasal 4 disebutkan bahwa:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak Untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak Untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

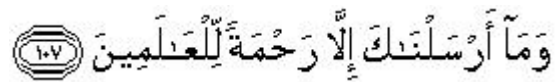
Pasal 5 Tentang Kewajiban Konsumen

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN MENURUT HUKUM ISLAM

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa syariat Islam itu datang dengan membawa rahmad bagi seluruh alam tidak terkecuali manusia. Firman Allah Swt. Di dalam surat al- Anbiya' ayat 107:



Artinya : “ Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmad bagi semesta alam.”¹

Tujuan umum disyariatkan hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam bidang hukum umpamanya Islam telah menggariskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, tidak membedakan antara sikaya dan si miskin. Islam tidak mengenal stratifikasi sosial (Kasta) yang memberikan hak Istimewa kepada golongan atau kelompok tertentu.

Tujuan adanya sesuatu keberadaan sesuatu menurut Islam adalah semata-mata untuk mengabdikan diri dan patuh kepada Allah SWT. Dalam masalah ini mungkin dapat dikira bahwa manusia tidak mempunyai hak sama sekali kecuali hanya mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap agama semata-mata. Padahal dalam hakekatnya dalam totalitas Islam dituntut adanya

¹ Al- Hakim, *al- Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Cv. Asy- Syifa, 1998). Cet.3, h.264

berbagai macam kewajiban manusia kepada Allah dan mencakup kewajiban pada masyarakat. Dan setiap hak individu itu dilindungi oleh hukum Allah.

Negara Islam juga merupakan sasaran dari hukum yang sama ini, yakni diwajibkan melindungi hak-hak individu. Semua hak dan kewajiban harus diperhatikan dan dihargai dalam segala keadaan. Oleh karena keberadaan sesuatu ini bersifat Ilahiah, maka hal itu tidak dapat diubah. Baik negara maupun warga negaranya terikat untuk mengikuti hukum- hukum ini kecuali kalau memang tidak diisyaratkan oleh hukum tersebut.

Negara Islam menegakkan pentingnya sebuah keseimbangan antara individu dengan negara sehingga negara tidak dapat bekerja dengan sikap yang otokrasi dan menjadikan individu-individu warga negaranya tidak berdaya serta tidak dapat memberikan suatu tingkat kebebasan yang tidak dikendalikan kepada salah satu individu yang dapat merusak masalah dan kepentingan kolektif. Negara harus dapat tumbuh dan berkembang dengan cara melimpahkan hak-hak fundamental tertentu kepadanya.²

A. Hak dan Kewajiban dalam Islam

1. Pengertian Hak

Dalam berbicara mengenai hak ada pengertian yang asasi tentang hak ini.

Pertama, sekumpulan nash dan qaidah yang mengatur atas dasar harus ditaati hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang

² Syekh Syaikat Husaiin, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Press, 1996). Cet. 1, h.22

yang maupun mengenai harta dalam pengertian ini hak sama dengan hukum dalam pengertian ulama ushul fikih.

Secara etimologi hak berarti milik, ketetapan atau kepastian, sebagaimana disebutkan dalam al- Qur'an:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya : ” Sesungguhnya telah pasti berlaku perataan atau (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman”. (Yasin:7).³

Hak juga berarti kebenaran, yaitu lawan dari kebatilan, sebagaimana firman Allah.:

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

Artinnya : ”Dan katakanlah: Yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap.” (al- Isra' :81) ⁴

Hak juga berarti adil, lawan dari zalim, seperti firman Allah:

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ط

Artinya : ”Dan Allah menghukum dengan adil atau keadilan”.
(al- Mu'min: 20) ⁵

³ Al- Hakim, *op.*, *cit.* h. 351

⁴ *Ibid.*, h.240

⁵ Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004).

B. Pembagian Hak

Dalam hukum Islam ditemukan bermacam hak yang pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Hak Allah, ialah seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan mengagungkan-Nya, seperti melalui berbagai macam ibadah, ijtihad, amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian juga halnya seperti untuk mencapai kepentingan dan kemaslahatan umum di dalam ini seperti penanggulangan bermacam persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana serta sangsi-sangsinya dan pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat kepentingan umum.

Hak Allah ini tidak dapat dikaitkan dengan hak pribadi. Hak Allah ini disebut hak Masyarakat. Seluruh hak Allah tidak dapat digugurkan, baik melalui perdamaian, maupun pemaafan dan tidak boleh diubah. Lebih lanjut para ulama fiqh mengatakan bahwa hak-hak Allah ini tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Sehubungan dengan hak Allah ini, tidak boleh menggugurkannya dengan memaafkannya, atau berdamai dan bahkan tidak boleh mengubahnya seperti potong tangan bagi pencuri, bila telah sampai persoalannya kepada hukum (pengadilan). Demikian juga dengan kasus perzinaan tidak dibenarkan menggugurkan (hukumnya) bila sudah sampai kepada pengadilan.

2. Hak manusia, ialah segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan

masyarakat. Seperti hak penjual untuk memiliki harga barang yang dijualnya, hak istri atas nafkah, hak pemeliharaan anak dan sebagainya. Hak manusia dapat digugurkan oleh manusia sendiri sebagai suatu pelepasan hak untuk orang lain, seperti hak berpiutang atas utang pada pihak berutang dapat dibebaskan, yang akibatnya gugur kewajiban membayar utang oleh pihak yang berutang.

3. Hak Gabungan, ialah gabungan antara hak Allah dan manusia dan ini mempunyai dua kemungkinan.

a. Hak Allah lebih nampak dari pada hak manusia seperti hukuman menuduh zina tanpa bukti yang cukup. Bila diperhatikan sebab adanya hukuman itu adanya dua macam hak, hak Allah dan hak manusia. Hukuman menuduh zina diadakan untuk menghindarkan kecemaran nama baik orang yang dituduh, disegi ini nampak adanya hak manusia. Di sisi lain hukuman diadakan untuk membuat orang tidak membuat kejahatan yang serupa, antar dua hak ini maka hak Allah yang dinampakkan, oleh karena pihak tertuduh tidak dapat memaafkan pihak penuduh yang berakibat gugurnya hukuman. Sebab tuduhan itu mengenai perbuatan zina yang amat merusak kehidupan masyarakat.

b. Hak manusia lebih nampak dari pada hak Allah. Seperti pada hukuman qishash dalam pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja. Hukuman ini diadakan dengan maksud agar sipelaku tidak mengulang lagi perbuatan yang sama, disamping untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar jangan melakukan perbuatan tersebut. Tapi dalam pada

itu kepada pihak keluarga terbunuh atau teraniaya diberikan hak untuk menggugurkan hukuman qishash, diganti dengan diyat oleh pihak pelaku dalam hal ini karena akibat perbuatan itu dirasakan langsung oleh keluarga korban, maka hukum Islam lebih mementingkan hak manusia daripada hak Allah.⁶

Dalam pada itu diketahui bahwa hak itu ada yang berupa hak-hak kebendaan dan bukan kebendaan. Hak kebendaan ada yang berupa hak-hak langsung menyangkut benda. Contoh hak nafkah isteri atas suaminya, hak penjual menerima harga penjualan barang dan sebagainya. Hak-hak bukan kebendaan adalah hak-hak yang tidak menyangkut dengan benda seperti hak mengasuh anak, hak perwalian dan lain sebagainya.

Di samping itu ada pula hak terbatas dan tak terbatas, hak terbatas adalah hak-hak yang tetap menjadi beban dan merupakan utang atas orang mukallaf, yang baru dipandang bebas setelah dibayarkan, contoh harga penggantian barang-barang yang dirusakkan, harga barang-barang yang diperjual belikan dan sebagainya. Hak tak terbatas adalah hak-hak yang menjadi kewajiban mukallaf tetapi tidak merupakan beban utang apabila tidak dilaksanakannya, contoh hak orang yang memerlukan pertolongan orang lain. Hal yang demikian merupakan kewajiban atas orang yang memerlukan ia dapat dituntut untuk memberi pertolongan akan tetapi bila ia tidak

⁶ *Ibid.*, h. 29

memenuhinya, tidak menjadi beban utang yang dapat ditagih dikemudian hari.⁷

Kewajiban erat kaitannya dengan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu kepada hak. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku akan perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

C. Macam-macam Kewajiban

Kewajiban dibagi menjadi dua bagian:

1. Kewajiban terbatas: kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada setiap orang sama tidak dibedakan. Contoh, Undang-undang larangan membunuh, mencuri, disamping itu hukuman-hukuman lainnya.
2. Kewajiban tidak terbatas: Kewajiban ini tanggung jawabnya diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih tinggi sebab dijalankan oleh suara hati, seperti keadilan dan kebajikan.

Orang yang bertanggung jawab itu adil. Atau mencoba berbuat adil tetapi adakalanya orang yang bertanggung jawab tidak dianggap adil, karena runtuhnya nilai-nilai yang dipegangnya. Orang yang demikian tentu akan mempertanggung jawabkan segala sesuatunya kepada tuhan. Dia tidak tampak tetapi menggerakkan dunia dan mengaturnya. Jadi, orang semacam ini akan bertanggung jawab kepada Tuhan.⁸

⁷ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2000). Cet. Pertama, h. 17

⁸ Rahiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al- Qur'an dan Hadist*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). Cet. I, h. 167.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN

KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999

A. Hak Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999

Pada dasarnya jika berbicara soal hak dan kewajiban maka kita harus kembali kepada Undang-undang. Undang-undang ini, dalam hukum perdata selain dibuat oleh pembuat Undang-Undang, juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu dan yang lainnya.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai "harga" dan "barang" atau jasa", tanpa diikuti dan ditindak lanjuti dengan suatu bentuk perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting hak konsumen saat sekarang ini, persoalan tentang Universitas hak konsumen dan hubungannnya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana hak manusia. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.

Perkembangan wacana global tentang hak konsumen memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Hak konsumen disebutkan dalam pasal 4.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Dalam surat al- Maidah ayat 88 dijelaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *"Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah yang telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya."*¹

Dalam ayat ini diperintahkan manusia agar menikmati segala macam rezki Allah berupa makanan dan minuman yang halal, lezat, dan bersih (agar kesehatan tetap terjaga).

Dalam Surat 'Abasa ayat 24, juga dijelaskan tentang ayat yang berhubungan dengan ayat yang diatas:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Artinya: *"Maka hendaklah manusia itu memperhatikannya makanannya."*²

Dalam al-Qur'an dijelaskan Ayat ini menyuruh manusia untuk memilih makanan yang halal dan bergizi tinggi untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohaninya.³

Dalam Islam Yang dimaksud dengan keselamatan adalah keselamatan hidup yakni mempertahankan hidup dan melanjutkan hidup.⁴

¹ Al- Hakim, *op., cit.* h. 97

² *Ibid.*, h. 468

³ Seri Pertama (Pengelompokan Ayat-Ayat al-Qur'an) *Pancaran al- Qur'an Terhadap Pola Kehidupan Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Pusta Alhusana, 1983). Cet. 2, h.89-90.

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. Dalam Islam hal yang demikian sangat perlu diperhatikan karena menyangkut kehidupan orang banyak yang mengkonsumsi barang tersebut.

Asas keselamatan bagi konsumen mengandung arti bahwa konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang akan dikonsumsi, mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatannya. Keamanan dan keselamatan bagi manusia yang pokok. Hanya saja disadari atau tidak, penghargaan orang terhadap hal itu berbeda-beda. Hal ini tergantung pada tingkat pendapatan dan kepedulian konsumen itu sendiri. Berangkat dari kondisi konsumen yang masih rentan, baik secara ekonomi maupun sosial maka Undang-undang perlindungan konsumen memandang perlu menggariskan etika dan peraturan yang diwajibkan pelaku usaha untuk jaminan keamanan dan keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah dapat dilihat bahwa hak atas keamanan dan keselamatan masih diabaikan. Contoh Misalnya: penggunaan jasa angkutan (kasus tabrakan kereta api Cirebon) atau kasus makanan beracun. Kekurang mampuan produk-produk negeri kita menembus pasar internasional adalah suatu bukti dimana produk dari para produsen dalam negeri relatif kurang baik. Dan pasar Internasional-

⁴ Sidi Gazalba, *Asas Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). Cet. III, h. 124,

dimana tingkat kompetesinya cukup tinggi, jelas akan menyingkirkan produk-produk yang tidak mempertimbangkan kewanan dan keselamatan konsumen.

- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Rasulullah SAW. Bersabda:

وقال صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق
البيعان وبينا بورك

Artinya: *"Bersabda Rasulullah Saw. Penjual dan pembeli itu kuasa memilih selama keduanya belum berpisah. apabila keduanya benar dan mau menerangkan (cacat barang dagangannya), maka diberi berkah keduanya didalam jual beli. Dan jika keduanya menyembunyikan (cacat barang dagangannya) dan berdusta, maka kemungkinan keduanya mendapat laba namun keduanya telah memusnahkan berkah jual belinya. Sumpah palsu itu melariskan barang dagangan, memusnahkan keuntungan". (HR. Bukhari dan Muslim)*⁵

Dalam sabda Rasulullah SAW maksud dari ayat di atas adalah dalam jual beli, antara penjual dan pembeli ada hak untuk berkhiyar. Artinya keduanya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya selama keduanya belum berpisah. Dibatalkan karena barang yang dibeli itu yang terdapat cacat yang mengurangi nilai harganya., atau penjual keliru dalam memberi harga. Oleh sebab itu selama dalam majelis penjualan sipembeli harus benar-benar meneliti barang yang akan di beli, begitu pula penjualan harus menerangkan cacat barangnya kalau memang

⁵ Mahfudli Sahli, *Amaliah Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998). Cet. 2, h. 109

ada. Penjual dilarang merahasiakan cacat barangnya. Karena hal yang demikian bisa menghilangkan berkat jual belinya., disamping memang dilarang oleh agama. Adapun maksud khiyar itu agar antara penjual dan pembeli mendapat kepuasan dan menghindarkan kerugian antara kedua belah pihak.

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk. Demikian pula suatu keputusan untuk memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak memilih yang dimiliki oleh konsumen hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang ataupun jasa).⁶

Mangkonsumsi suatu barang atau jasa harus berangkat dari kebutuhan dan kecocokan konsumen. Bagi konsumen golongan menengah keatas yang memiliki kekuatan materi, mungkin saja tidak mempunyai masalah dengan hak pilih. Namun bagi konsumen golongan bawah, dimana kemampuan daya belinya relatif rendah, maka hal itu menjadi masalah. Ketidak berdayaan konsumen golongan ini umumnya terletak pada pengetahuan mutu suatu barang atau jasa. Sekalipun mereka

⁶Ahmadi Miru, *op., cit*, h. 42.

mengetahui adanya ancaman yang terselip dari barang yang dikonsumsi tersebut, tetap saja konsumen golongan ini akan mengonsumsi barang atau jasa tersebut karena sesuai dengan daya belinya. Disamping itu hak konsumen dalam memilih barang atau jasa tidak akan ada artinya bila pengadaan barang atau jasa dimaksud dilakukan secara monopoli.

- c. Hak atas Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.

Hal ini sangat penting, karena kelangkaan ataupun kekeliruan memberikan informasi akan memberikan gambaran yang salah dan membahayakan bagi konsumen. Hak atas informasi ini, konsumen perlu waspada mengingat seringkali pihak produsen/pedagang melakukan penyampaian informasi secara berlebihan. Sehingga dalam banyak hal pihak produsen/pedagang tanpa tersadar sering mendorong konsumen untuk bertindak tidak lagi rasional. Untuk itu konsumen perlu selektif terhadap informasi yang diberikan dan berusaha mencocokkan dengan kenyataan yang ada pada produk tersebut.

- d. Hak Untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan

Hak ini dimaksudkan sebagai jaminan bahwa kepentingan pendapat, serta keluhan konsumen harus diperhatikan oleh pemerintah, produsen maupun pedagang. Hak untuk didengar dapat diungkapkan oleh konsumen dengan cara mengadu kepada produsen/ penjual/ instansi yang terkait. Dan konsumen perlu memanfaatkan hak untuk didengarnya dengan

baik serta optimal. Hal ini dirasa perlu, karena dari pengalaman sehari-hari terlihat, bahwa hak untuk didengar ini belum dimanfaatkan. Contoh yang paling sederhana misalnya. Dalam ikatan transaksi jual beli, atau sewa menyewa, kontrak-kontrak sepihak dan ketentuan-ketentuan yang tercantum pada bon pembelian yang biasanya hanya menguntungkan produsen/ pedagang, biasanya karena dipermasalahkan secara terbuka. Walaupun telah merasakan ketidak keseimbangan ketentuan tersebut, konsumen segan mengajukan usulan yang menjadi haknya. Kedepannya hal tersebut perlu mendapat perhatian agar konsumen jangan selamanya berada pada posisi yang dirugikan.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum.

Dalam al- Qur'an dikatakan:

فَلِذَلِكَ فَادُّعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا
 وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya: "Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah

Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).” (asy- Syu’ara:15)”⁷

Hak ini adalah suatu hak yang sangat penting dimana agama Islam telah menganugerahkan kepada setiap orang sebagai umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, sebagaimana al- Qur’an mengatakan:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya :”Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukri-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka alkitab dan neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya dapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat baginya manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu)...” (al- Hadid: 25).⁸

Untuk mendapatkan hak upaya penyelesaian hukum sengketa secara patut maka umat islam diperintahkan supaya menjunjung tinggi keadilan meskipun kepentingan mereka sendiri dalam keadaan bahaya.

Bahwasanya didalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen tercangkup juga kewajiban untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri., sehingga pada

⁷ Al- Hakim, *op.*, *cit.* h.293

⁸ *Ibid.*, h. 432

gilirannya dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen sekaligus menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu pemberian perlindungan hukum bagi konsumen hendaknya tanpa merugikan pelaku usaha yang memang berperilaku baik dan jujur.

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Pendidikan merupakan sisi kehidupan manusia yang amat menentukan jalan nasibnya. Dengan pendidikan itu terbukanya kesempatan baginya untuk mengembangkan potensi budaya manusia (seperti pikiran, perasaan, angan-angan, kehendak dan tenaga). Dapat mencapai kemampuan yang maksimal.

Firman Allah dalam Surat al- Alaq ayat 1-5 menjelaskan:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ② اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ⑤

Artinya: "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah yang maha pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam di mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui."⁹

Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa agama Islam mendorong umat-Nya agar menjadi umat yang pandai, dimulai dengan belajar baca tulis dan diteruskan dengan belajar berbagai macam ilmu pengetahuan.

Disamping menekankan kepada umatnya untuk belajar juga menyuruh umatnya untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Jadi,

⁹ *Ibid.*, h. 479

Islam mewajibkan umatnya belajar dan mengajar. Melakukan proses belajar dan mengajar adalah bersifat manusiawi yakni sesuai dengan harkat kemanusiaannya, sebagai makhluk Homo edocandus, dalam arti manusia itu sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik.

Dalam Sabda nabi juga dikatakan:

(طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)

Artinya: *"Menuntut Ilmu pengetahuan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim pria dan wanita". (H.R. Ibnu Abdil Bar).¹⁰*

Al-Ghazali menurut pandangannya pendidikan adalah menggambarkan kedahagaan untuk mencari kebenaran yang tidak pernah puas.

Dari ayat dan hadis diatas tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Agama Islam memerintahkan kepada umat-Nya untuk belajar berbagai macam ilmu pengetahuan, baik Ilmu duniawi (umum) atau ilmu ukhrowi (Agama).
2. Bahwa Islam telah mewajibkan menuntut Ilmu pengetahuan kepada seluruh kaum muslimin, baik pria ataupun wanita sepanjang hidupnya, sejak lahir sampai meninggal dunia. Hal ini membuktikan bahwa islam sejak awal telah meletakkan dasar adanya pendidikan seumur hidup (*Life long educasion*).

¹⁰ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004). Cet. 3, h.98

3. Disamping memerintahkan umatnya untuk belajar, juga memerintahkan umatnya untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain, dengan mempergunakan metode pendidikan yang tepat guna sehingga dapat berhasil guna.
4. Allah sangat mendorong umatnya untuk belajar dan mengajar dan sangat menghargai orang yang berilmu pengetahuan bahkan akan mengangkat martabai atau derajat mereka tempat yang terpuji.

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

Pendidikan manusia adalah pendidikan Islamiyah, yang telah mengajarkan kepadanya tentang bagaimana menyikapi hidup diantaranya sesama manusia. Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk membawa kehidupan individu yang tidak berdaya pada saat permulaan hidupnya menjadi suatu pribadi yang mampu berdiri sendiri dan dan bertransaksi dalam kehidupan bersama orang lain. Untuk mencapai keadaan yang demikian ini sudah tentu diperlukan waktu yang panjang, dan bahkan pendidikan itu berlangsung seumur hidup.¹¹

¹¹ Ali Abdul Halim, *Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1998). Cet. 1, h. 321

Agama Islam telah menegaskan pentingnya hak bagi setiap insan untuk menuntut ilmu bagi dirinya. Rasulullah SAW. Memerintahkan kepada tiap-tiap orang Islam untuk mencari ilmu pengetahuan dan hal ini menjadi kewajiban bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.

Konsumen berhak mendapatkan pendidikan dan keterampilan, terutama yang menyangkut mutu barang dan layanan agar peluang seorang konsumen untuk ditipu atau tertipu semakin kecil. Untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna dari pendidikan ini konsumen memang dituntut aktif, seperti membiasakan untuk membaca label. Dan sebaliknya sangat diharapkan peran serta pemerintah dan produsen untuk mendistribusikan materi yang diperlukan konsumen.

- g. Hak Untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Dalam praktek sehari-hari masih banyak dijumpai adanya pelaku usaha yang suka membedakan pelayanan terhadap seorang konsumen dengan konsumen lainnya antara lain dengan memilah-milah status konsumen.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ketika UUPK ini dirancang, para perumus RUUPK sangat memperhatikan dasar-dasar acuan untuk mewujudkan perlindungan konsumen, yaitu pertama, hubungan hukum antara penjual dengan

konsumen secara jujur, kedua, hubungan kontrak penjual dan konsumen dirumuskan dengan jelas. Ketiga, konsumen sebagai pelaku perekonomian, keempat konsumen yang menderita kerugian akibat yang cacat mendapat ganti rugi yang memadai. Kelima, diberikannya pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak. Dasar-dasar tersebut telah menekankan pada pentingnya pemberian hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi/ penggantian. Apabila tidak sesuai dengan yang dijanjikan maupun tidak dalam kondisi sebagaimana mestinya. Terlepas adanya unsur ketidak sengajaan dari pihak penjual yang mengakibatkan terjadinya cacat barang yang tersembunyi. Dan sekalipun telah yakin terhadap kejujuran penjual tersebut, maka pada kasus ini telah melekat hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi dimaksud bisa saja dalam bentuk pengembalian pembayaran, mengganti dengan barang baru yang sama., ataupun bentuk kompensasi lainnya sesuai hasil penyelesaian masalah/ sengketa.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

Kita semua adalah Konsumen (pembeli). Ungkapan "Konsumen adalah Raja" semestinya di interpretasikan secara kritis. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Konsumen selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen.

¹²[Ttp://edukasi.kompasiana.com/2010/01/29/santai-sejenak-sambil-minum-kopi-hangat-membicarakan-mengenai-hal-perwujudan-hak-hak-konsumen-melalui-undang-undang-no-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen/](http://edukasi.kompasiana.com/2010/01/29/santai-sejenak-sambil-minum-kopi-hangat-membicarakan-mengenai-hal-perwujudan-hak-hak-konsumen-melalui-undang-undang-no-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen/)

Mantan presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy, pernah mengemukakan 4 hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak memperoleh keamanan
2. Hak memilih
3. Hak mendapat informasi
4. Hak untuuk didengar

Perkembangan Organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Internasional Organization Of Consumers (IOCU)* menambahkan 4 hak dasar dengan:

- a. Hak mendapatkan pendidikan Konsumen.
- b. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian
- c. Hak mendapatkan lingkungan yang baik.
- d. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat

Masyarakat Eropa juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan.
- b) Hak perlindungan kepentingan ekonomi.
- c) Hak mendapat ganti rugi.
- d) Hak atas penerangan.
- e) Hak untuk didengar.

Dalam hukum positif Indonesia, Hak-hak konsumen juga diakomodasi seperti tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4.

Secara garis besar Hak-hak konsumen dapat dibagi dalam 3 hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian baik bagi personal maupun kerugian harta kekayaan.
- b. Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang wajar.
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena ke 3 hak atau prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri adalah jaminan yang semestinya didapat oleh konsumen.¹³

B. Kewajiban Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Dalam pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Kewajiban Konsumen yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.

Dalam Islam dikatakan bahwa:

Dalam Surat al- Muthaffifin ayat 1-3 dijelaskan:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

¹³ Ahmadi Miru, *op.,cit.* h. 39

Artinya: ” *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,(2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi(3).*”¹⁴

Perdagangan harus dijalankan secara jujur. Jika orang menimbang, menakar, atau mengukur untuk diri sendiri tidak boleh dilebihkan dan jika untuk orang lain tidak boleh di kurangi.¹⁵

Dalam bertransaksi jual beli agar jual beli dapat berjalan dengan baik cara pelayanan dalam bersikap haruslah melayani pembeli dengan baik dan penuh ramah tamah.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Hal ini berkaitan dengan Khiyar Syarath yang mana Nabi Saw bersabda yang artinya:

”Apabila dua orang melupakan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah badan.”

Khiyar Syarath ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakat atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

¹⁴ Al- Hakim, *op., cit*, h. 470

¹⁵ Seri Pertama (Pengelompokan ayat-ayat al-Qur'an), *op., cit*. h. 63.

Umpamanya pembeli mengatakan "Saya akan membeli barang anda ini dengan keuntungan diberi tenggang waktu selama 3 hari" sesudah 3 hari tidak ada berita akad itu batal

Para ulama fiqih berpendapat bahwa khiyar syarath ini dibolehkan untuk menjaga hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.¹⁶

Itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atau perlindungan atau kepastian hukum bagi dirinya.¹⁷

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa yang perlu tidak hanya upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif, tetapi perlu juga tentang peraturan pelaksanaan, pembinaan aparat, pranata dan perangkat-perangkat yudikatif, administratif dan edukatif, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya, agar nantinya undang-undang tersebut dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Begitu juga dalam Islam berbagai usaha perlindungan yang telah ditetapkan agama Islam terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Usaha perlindungan ini beranjak dari sifat yang mendasar dari sistem politik Islam. Islam telah memberikan kedudukan penting yang maksimal terhadap hak-hak dan kewajiban manusia. Islam menganggap hal ini bahkan lebih suci dari pada ibadah dalam pengertian khusus.

¹⁶ Ali Hasan, *op., cit.*, h. 139

¹⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op., cit.*, h. 31

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

Setelah itu, resolusi perserikatan bangsa-bangsa nomor 39/248 tentang perlindungan konsumen, juga merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:

- a) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b) Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
- c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d) Pendidikan konsumen .
- e) Tersediannya upaya ganti rugi yang efektif
- f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Undang-undang tentang perlindungan konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Namun, kelihatan bahwa hak yang diberikan kepada konsumen (yang diatur dalam pasal 4) lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha

¹⁸ *Ibid.*, h. 8

(yang dimuat dalam pasal 6) dan kewajiban pelaku usaha (dalam pasal 7) lebih banyak dari kewajiban konsumen (yang termuat dalam pasal 5).

Dalam undang-undang No. 8 tahun 1999 Presiden Republik Indonesia Menimbang:

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era global harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.
- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang atau jasa yang diperolehnya dipasar.
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

- e. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.
- g. Bahwa untuk itu perlu di bentuk Undang-undang Tentang perlindungan konsumen.

Dengan Persetujuan DPRRI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) maka ditetapkanlah Undang-undang tentang perlindungan konsumen. Maka dari itu pemerintah haruslah lebih memperhatikan hak dan kewajiban konsumen sebagaimana mestinya. Dari pertimbangan yang telah dibuat oleh presiden yang telah disetujui oleh DPR untuk itu pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi dengan adanya keputusan dari DPR maka pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen sudah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah..

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan oleh masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Adapun Asas dan Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk dapat memberikan manfaat dan mendapat keadilan yang seimbang dalam menjaga keselamatan konsumen serta memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian huku dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatksn informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran perilaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa. Kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁹

Dasar Hukum UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Secara umum dasar hukum UU No. 8 Tahun 1999 pada hakekatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia.

Pertama, Undang-undang dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita oleh transaksi suatu barang atau jasa.²⁰

C. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap hak dan kewajiban Konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 dan 5.

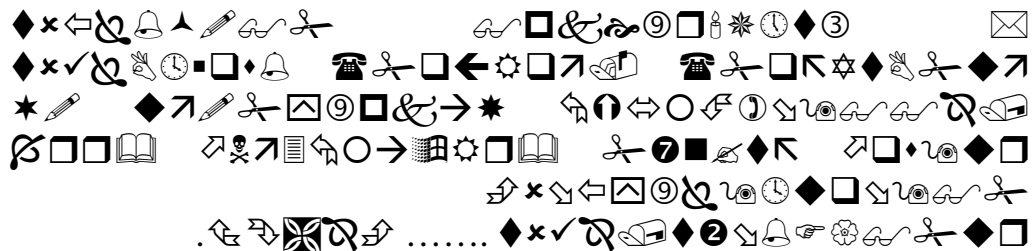
¹⁹*Ibid.*, h. 6

²⁰[Http:// www. Republika.Co.id](http://www.Republika.Co.id), Tanggal 4 Mei 2010.

Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Islam tidak mengenal kasta yang memberikan hak istimewa kepada golongan atau kelompok tertentu. Islam itu mengandung aqidah mempunyai peraturan hukum dan Undang-Undang. Negara Islam merupakan sasaran hukum yang sama yakni, diwajibkan melindungi hak-hak individu. Semua hak dan kewajiban harus diperhatikan dan dihargai dalam segala keadaan oleh karena keberadaan sesuatu itu bersifat ilahiah maka hal itu tidak dapat diubah. Kewajiban erat kaitannya dengan tanggung jawab. Kewajiban menurut Islam adalah sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak dan dapat juga tidak mengacu kepada hak.

Negara Islam menegakkan pentingnya sebuah keseimbangan antara individu dengan negara sehingga negara tidak dapat bekerja dengan sikap yang otokrasi dan menjadikan Individu-individu warga negaranya tidak berdaya serta tidak dapat memberikan suatu tingkat kebebasan yang tidak dikendalikan kepada salah satu individu yang dapat merusak masalah dan kepentingan kolektif. Dalam Islam hak konsumen lebih diarahkan kepada kepentingan individu yang secara tidak langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat dalam Undang-undang hak konsumen lhanya mengarah kepada kepentingan individu. Lain lagi halnya dengan kewajiban dalam Undang-undang kewajiban dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku sedangkan kewajiban menurut Islam kewajiban adalah dijalankan berdasarkan suara hati.

Firman Allah dalam al- Qur'an dijelaskan yang artinya:



Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu".

(Qs. an-Nisaa': 135)²¹

Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha sebagai isi pokok maqashit *asy-syariah*, sehingga mustahil melihat sebuah masyarakat muslim yang tidak menegakkan keadilan di dalamnya. Islam tegas sekali dalam menegakkan menghapuskan semua bentuk kezaliman. Penegak keadilan dan menghapuskan semua bentuk ketidak adilan hal ini membuktikan bahwa Islam adalah merupakan suatu hukum yang sangat kuat dan tidak dapat diganggu gugat karna itu semua adalah ketetapan dari Yang Maha Kuasa hal ini telah ditekankan dalam al-Quran sebagai misi utama para rasul Allah (al-Hadiid:25) al-Qur'an menepatkan keadilan paling dekat kepada takwa.

Dalam kata lain hak menurut Islam yaitu kekuasaan menguasai sesuatu. Hukum Islam dalam mengatur pergaulan hidup manusia memberikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar ketertiban masyarakat bisa terujud.

²¹ Al- Hakim, *op.*, cit. h. 79

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak konsumen dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 saat sekarang ini masih belum dijalankan dengan semestinya meskipun sudah diberlakukan Undang-undang tersebut tetapi masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya dengan semestinya. Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa hak-hak Konsumen itu adalah suatu individu berhak untuk mendapatkan perlindungan, mengeluarkan pendapat, berhak untuk bertindak, berhak untuk mendapat pendidikan, berhak atas kenyamanan dan berhak memilih sesuai dengan keinginannya dalam kenyataanya hal semacam ini masih terabaikan dan belum berjalan dengan semestinya. Undang-Undang pasal 5 No. 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang kewajiban konsumen yang mana kewajiban konsumen itu sendiri adalah diwajibkan kepada konsumen untuk membaca dan mengikuti petunjuk informasi, beritikad baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati serta mengikuti penyelesaian hukum sengketa secara patut. Kewajiban semacam ini dijalankan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

2. Pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen menurut pasal 4 dan 5 dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Namun, bagi yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi hukuman.
3. Dari sistem analisa diatas dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 sangat berbeda dengan hak dan kewajiban bila dipandang dalam hukum Islam. Perbedaannya yaitu Menurut UU No. 8 Tahun 1999 hak konsumen lebih mengarah kepada kepentingan individu saja. Sedangkan menurut agama Hak konsumen hanya mengarah kepada kepentingan individu dan secara tidak langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat. Menurut UU No 8 Tahun 1999 kewajiban konsumen dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, sedangkan menurut agama kewajiban dijalankan berdasarkan suara hati. dari segi positif hak dan kewajiban konsumen ini sangat dijunjung tinggi didalam agama. Tetapi didalam Undang-undang perlindungan konsumen hak-hak lebih di dahulukan dari kewajiban

B. Saran

Setelah membahas secara mendalam mengenai hak dan kewajiban Consumer dalam UU No. 8 Tahun 1999, penulis menemukan sesuatu yang patut dijadikan sebagai satu saran, hal tersebut adalah.

1. Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk memperjelas makna hak dan kewajiban konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan Undang-undang tersebut.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mensosialisasikan undang-undang No. 8 tahun 1999 dalam rangka pelaksanaan undang-undang tersebut secara totalitas.
3. Diharapkan kepada pemerintah yang telah membuat peraturan perlindungan Konsumen. Untuk mempublikasikan hak-hak dan kewajiban konsumen yang telah dibuatnya agar tidak terjadi pengabaian terhadap konsumen.

DAFTAR PUSAKA

- Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandug : PT. Syamil Cipta Media, 1987), cet. 3
- Al-Bani, Nasiruddin, *Muhammad, Silsilah Hadist Shahih*, (Jakarta : Qisthi Press, 2006), cet. 2
- Ali, Daud Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonsia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet 3
- Ash shiddiegy, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1991), cet . 4
- Dkk, Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), cet. 3
- Edmom, Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet . 2
- Ghazalba, Sidi, *Asas Kebudayaan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), cet 3
- Hasan, M.Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004), cet. 2
- <http://ww.republik.co.id>, (tanggal 4 mei 2010)
- Husaiin, Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta : Gema Press, 1996), cet. 1
- Husaian, Ahmet, Waqar, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Pustaka Salman , 1980), cet. 1
- Jafri, Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru, Suska Press), cet. 1
- Junus, Haji Muhammad, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1988), cet. 2
- Karim Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fikih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), cet. Ke-3
- M.Elli, Dkk, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-13

- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Riau: UNRI Press, 2007), cet. ke-1
- Muhammad, Halim, Abdul, Ali, *Fikih Responsibilitas Tentang Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), cet. 1
- Notowidagho Rohim, *Ilmu Budaya Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002), cet. 2
- Putra, Dan Nasutionm, Buyung Adnan, *Istrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), cet. 3
- Sahli, Manfadi, *Amaliyah Surgawi*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1998), cet. 2
- seri Pertama (Pengelompokan Ayat-Ayat Al-Quran), *Pancaran Al-Quran Terhadap Pola Kehidupan Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al Husana, 1993), cet. 2
- suryosubroto, b, beberapa aspek dasar-dasar pendidikan, (jakarta : rineka cipta, 1990), cet. 2
- <http://edukasi.kompas.com/2010/01/29/santai-sejak-sambil-minum-kopi-hangat-membicarakan-mengenai-hal-perwujudan-hak-hak-konsumen-melalui-undang-undang-no-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : C V. Tamita Utama, 2002), cet. 2
- Widjajah, Gunawan, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet.ke-4
- Yaman, Zaki Ahmad, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta Selatan : Yayasan Bineka Tunggal Ika, 1976), cet. 1
- Yodo, Sutarman Dan Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet. 2